

Catatan Jurnal Perempuan

Rumah

Rumah adalah rahim peradaban. Tetapi sesungguhnya, dalam statistik, lebih banyak perempuan yang mati di dalam rumahnya, dibanding yang mati di jalan raya. Kekerasan bersembunyi di diruang-ruang privat: penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, penyakit, kemiskinan, hujatan, stigma, perbudakan, masih menghantui rumah -yang selalu diangankan sebagai "istana perempuan".

Pernah, dan mungkin masih, di sebuah budaya, sebuah doa pagi diucapkan begini: "terima kasih ya Tuhan karena aku dilahirkan bukan sebagai seorang budak, dan bukan sebagai perempuan".

Hukum belum tiba di rumah. Begitu juga kebijakan negara. Cara pandang kebudayaan adalah palang penghalang kuat, yang menutup pintu rumah dari ketukan kesetaraan. Tetapi juga oleh siasat patriarkisme politik, anggaran kesejahteraan publik tidak tiba pada perempuan dan rumah tangganya. Bagaimana mungkin ide kesejahteraan keluarga diwujudkan bila 70% APBD di hampir semua kabupaten kita, habis untuk pos "belanja aparatur negara", dan justeru disebut pos "anggaran rutin".

APBD bukanlah dokumen ekonomi semata. Ia adalah pertama-tama dokumen politik. Di dalamnya transaksi partai-lah sesungguhnya yang berlangsung. Tukar-tambah politik dalam pilkada, berakibat langsung pada struktur APBD yang 'koruptif'. Pengabaikan hak utama kesejahteraan rakyat, segera terlihat dalam Index Pembangunan Manusia kita yang memburuk. Kegagalan kita memenuhi target MDG's, juga memperlihatkan buruknya kebijakan kesejahteraan di tingkat lokal.

Dalam bidang hukum (perkawinan, waris, kewarganegaraan), upaya egalitarisasi hak perempuan sebagai dasar mencapai kesamaan akses pada kebijakan publik, masih dalam tahap perjuangan awal. Hambatan kebudayaan, yang sering berintikan ajaran agama, masih mencurigai proyek egalitarian ini sebagai melanggar 'kodrat langit'

Politik adalah ambisi yang tumbuh di luar rumah. Wilayah itu disediakan khusus untuk laki-laki. Tetapi sugesti keadilan feminis telah

mendesakkan perubahan cara pikir melalui argumentasi, riset dan advokasi. Kesejahteraan dan ukuran-ukuran keadilan kini dihitung langsung pada tingkat paling lokal: keluarga. Itulah sesungguhnya hasil panjang perjuangan politik feminis.

Kita kini dituntut berpikir melampaui doktrin-doktrin utilitarian, yaitu bahwa kesejahteraan keluarga adalah ukuran keadilan negara. Dengan cara ini, ada kesempatan sejarah untuk mengembalikan rahim peradaban itu dari penguasaan patriarkisme.

Kesempatan itu harus juga menjadi titik balik dalam cara negara merumuskan program kesejahteraan. Basis pelayanan publik bukanlah asuransi berdasarkan nilai ekonomistik. Keamanan sosial-ekonomi keluarga sebagai dasar penentuan "indeks kebahagiaan" nasional harus dimengerti sebagai kewajiban etis negara untuk menjamin batas deprivasi sosial warganegara.

Rumah sebagai rahim peradaban, juga berkoneksi dengan seluruh institusi kesejahteraan: sistem jaminan kesehatan, pendidikan dan sistem pengambilan keputusan politik. Parlemen yang arogan, partai politik yang oligarkis, kabinet yang inkompeten, justeru membebani perubahan paradigma kesejahteraan publik.

Rumah adalah rahim peradaban. Negara hanya didirikan untuk menyelenggarakan peradaban. Setiap suara yang menjerit dari dalam rumah, adalah pertanda perbudakan. Bukan peradaban.

Teori dan ideologi kesejahteraan sosial dunia sedang berubah drastis. Ada kesadaran etis global untuk mengakui bahwa peradaban telah berabad-abad diselenggarakan di luar rahim perempuan. Kini, pengakuan itu haruslah menghasilkan kebijakan negara yang juga bermutu etis bagi semua penghuni rumah. Itulah kesetaraan! (RG)